

Transformasi Wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon sebagai Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta

Gandes Luwes Hayuning Uswatun Hasanah

gandesluweshuh@gmail.com

Andri Kurniawan

andrikur05@yahoo.com

Abstract

The rapid development of the city will have an influence on the development of the surrounding area. There is an inequality in urban level and in the intensity of regional transformation received in each sub-district in the suburbs of Yogyakarta City, especially in the Depok and Sewon Subdistrict that are part of the Yogyakarta Urban Area. This study aims to: (i) describe the regional transformation that occurred in Depok and Sewon Subdistricts in 2006-2016, (ii) identify the dominant factors that determine the difference in regional transformation in the two sub-districts, and (iii) arrange the direction of regional development in the suburban area. The results showed: (i) the regional transformation in Sewon Subdistrict was higher than Depok Subdistrict in the range of 2006 to 2016; (ii) there is no dominant factor that determines the difference in the regional transformation of these two sub-districts from the results of the Kruskal-Wallis analysis, however, from the Crosstab analysis aspects of population density, the availability of educational facilities, worship facilities, and economic facilities have a relationship with the level of regional transformation in these two sub-districts; (iii) the direction of regional development in general is emphasized on controlling population density and improving public service facilities (educational facilities, worship facilities, and economic facilities).

Key words: suburbs, regional transformation, urban level

Abstrak

Perkembangan kota yang pesat akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan daerah sekitar. Ada perbedaan tingkat kekotaandan ketidakmerataan intensitas transformasi wilayah yang diterima tiap kecamatan di daerah pinggiran kota, khususnya di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon yang merupakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan: (i) mendeskripsikan transformasi wilayah yang terjadi di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon tahun 2006—2016 (ii) mengidentifikasi faktor dominan yang menentukan perbedaan transformasi wilayah di dua kecamatan tersebut, serta (iii) menyusun arahan pengembangan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan: (i) transformasi wilayah di Kecamatan Sewon lebih tinggi daripada yang terjadi di Kecamatan Depok dalam rentang tahun 2006—2016; (ii) tidak ada faktor dominan yang menentukan perbedaan transformasi wilayah di dua kecamatan ini dari hasil analisis Kruskal-Wallis, namun dari analisis Crosstab aspek kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, dan fasilitas ekonomi memiliki hubungan dengan tingkat transformasi wilayah; (iii) arahan pengembangan wilayah secara umum ditekankan padapengendalian kepadatan penduduk dan peningkatan fasilitas pelayanan publik (fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, dan fasilitas ekonomi).

Kata Kunci: daerah pinggiran kota, transformasi wilayah, tingkat kekotaan

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah yang terjadi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu menyebabkan terjadinya perubahan kenampakan keruangan di berbagai wilayah, terutama perkembangan di kawasan perkotaan. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan ruang di kota semakin meningkat, sementara lahan yang tersedia semakin terbatas. Akibatnya, terjadi penumpukan aktivitas penduduk di pusat kota yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk disertai peningkatan kebutuhan akan perumahan dan berbagai sarana prasarana lainnya. Hal tersebut memaksa pergeseran perkembangan kota dari pusat kota ke kawasan pinggiran, sesuai dengan pernyataan Adisasmita (2015) yang mengemukakan bahwa orientasi perkembangan kota menuju ke arah wilayah perbatasan, dalam hal ini wilayah pinggiran kota.

Kota Yogyakarta dengan ikonnya sebagai kota pelajar, pariwisata, dan pusat kebudayaan juga terus mengalami perkembangan wilayah. Perkembangan fungsi kota yang semakin tinggi intensitasnya dihadapkan pada keterbatasan lahan, mengakibatkan sulitnya memperoleh lahan untuk mewadahi tuntutan kehidupan kota. Tercatat luas wilayah di Kota Yogyakarta sebesar 32,50 km² dengan kepadatan penduduk 12,85 per km² (BPS, 2017). Padatnya kegiatan di kota menyebabkan daerah tersebut berkembang melewati batas wilayahnya, sehingga perkembangan Kota Yogyakarta mengarah ke daerah pinggiran kota yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Salah satu kecamatan di pinggiran Kota Yogyakarta yang mengalami perkembangan cukup pesat dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu Kecamatan Depok yang berada di bagian utara Ibu Kota Provinsi DIY. Penelitian yang dilakukan oleh Huriati (2008) menunjukkan bahwa pada rentang tahun 1992 hingga 1999 permukiman di wilayah tersebut berkembang cukup pesat, kemudian pada tahun 2006 lahan hijau semakin berkurang sangat jauh luasannya. Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Depok lebih disebabkan oleh banyaknya perguruan tinggi yang ada. Tercatat, di kecamatan ini terdapat tidak kurang 23 perguruan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi itu memicu munculnya berbagai kegiatan

komersial di daerah tersebut. Terlebih lagi, permintaan akan daerah permukiman baru juga semakin meningkat yang menyebabkan intensitas alih fungsi lahan maupun perubahan pemanfaatan lahan menjadi tinggi.

Adapun menurut Hariyono (2010) Kecamatan Depok dapat berkembang pesat disebabkan oleh: 1) keberadaan fasilitas pendidikan (kampus UGM, UNY, dan universitas swasta favorit) yang terletak di Kecamatan Depok atau dekat dengan daerah ini; 2) lokasi yang dekat menuju fasilitas pariwisata (Kaliurang); 3) memiliki lokasi yang subur dengan kondisi udara yang cukup sejuk (karena mendekati gunung Merapi) dan memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari pusat kota, sehingga cenderung diminati sebagai tempat tinggal (perumahan).

Sementara itu, Kecamatan Sewon yang juga merupakan daerah pinggiran Kota Yogyakarta memiliki perkembangan wilayah yang relatif kurang cepat bila dibandingkan dengan kecamatan lain di pinggiran kota. Perkembangan permukiman di daerah tersebut dari hasil penelitian Huriati (2008) termasuk lambat jika dibandingkan dengan daerah pinggiran kota yang berada di zona lainnya (zona utara, timur, dan barat). Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan daerah selatan yang pada zaman Kasultanan Yogyakarta diperuntukkan sebagai daerah pribadi anggota kasultanan, sehingga masyarakat merasa segan untuk bermukim di daerah tersebut.

Huriati (2008) dalam penelitiannya hanya mengkaji dinamika wilayah dari perubahan pemanfaatan lahan saja yang meliputi perkembangan permukiman dan pengurangan lahan hijau. Belum ada kajian terkait transformasi wilayah dari berbagai aspek yang terjadi di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon dalam kurun waktu 2007 hingga 2017. Selain itu, belum teridentifikasi faktor-faktor yang menentukan perbedaan transformasi wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon dalam kurun waktu tersebut. Hasil analisis dari transformasi wilayah yang terjadi di kecamatan tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun arahan pengembangan wilayah di pinggiran Kota Yogyakarta, khususnya di kedua daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan transformasi wilayah yang terjadi di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon; 2) Mengidentifikasi faktor dominan yang menentukan perbedaan transformasi wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon; serta 3) Menyusun arahan pengembangan wilayah di pinggiran Kota Yogyakarta, khususnya di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon.

Perkembangan spasial horizontal merupakan perkembangan kota secara meluas yang bersifat mendatar (Adisasmita, 2015). Daerah terbangun makin luas, diperlukan lahan yang cukup luas, tetapi makin lama akan makin sulit dapat memperoleh lahan. Akibatnya orientasi perkembangannya menuju ke arah wilayah perbatasan dan disebut dengan perkembangan spasial horizontal sentrifugal, yaitu suatu proses bertambahnya ruang kekotaan yang sudah terbangun dan mengambil tempat di pinggiran kota. Menurut Yunus (2001) daerah pinggiran kota adalah daerah yang terletak di sekeliling kota dan ditandai oleh percampuran antara sifat kekotaan dan sifat kedesaan. Selain itu, daerah pinggiran kota juga diartikan sebagai daerah yang mempunyai ciri dinamika perubahan pemanfaatan lahan yang tinggi. Hal ini disebabkan daerah tersebut menjadi sasaran kedatangan pendatang, baik perorangan atau kelembagaan yang datang dari dalam kota maupun dari luar kota. Adanya perkembangan perumahan dan infrastruktur di daerah pinggiran kota menurut Kurniawan dan Prakoso (2008) akan secara potensial mengubah daerah tersebut menjadi perkotaan.

Transformasi wilayah merupakan representasi dari perkembangan wilayah yang digambarkan sebagai suatu proses perubahan dan pergeseran karakteristik dari komponen wilayah dalam kurun waktu tertentu sebagai akibat dari hubungan timbal balik antar komponen wilayah tersebut, dengan demikian transformasi wilayah meliputi variabel-variabel yang bersifat multidimensional (Giyarsih, 2009). Lebih lanjut Giyarsih (2009) menyebutkan ada empat komponen penyusun transformasi, meliputi kepadatan penduduk, persentase kepala keluarga non petani, persentase lahan terbangun, serta ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Yunus (2008) menyebutkan bahwa transformasi wilayah terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah pinggiran kota (peri urban) sebagai akibat dari kedatangan penduduk dan

fungsi yang terus-menerus ke wilayah tersebut. Wilayah pinggiran kota menjadi wilayah yang paling dinamis kondisinya dibandingkan dengan bagian-bagian lain baik di bagian dalam kota maupun di daerah perdesaan karena bagian ini merupakan sasaran pendatang, baik penduduk maupun fungsi-fungsi yang berasal dari bagian dalam kota, kota-kota lain, maupun dari wilayah perdesaan untuk bertempat tinggal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif terhadap data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur dan survei instansional. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama, yaitu mendeskripsikan transformasi wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon adalah analisis indeks komposit dengan metode *scalling*. Sementara pada tujuan ke dua, yakni mengidentifikasi faktor dominan yang menentukan perbedaan transformasi wilayah di dua kecamatan tersebut menggunakan metode statistik *Kruskal-Wallis*, untuk melengkapi hasil tersebut digunakan pula analisis *Crosstab*. Adapun untuk menyusun arahan pengembangan wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon pada tujuan ke tiga menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal pada tiap kecamatan serta memperhatikan hasil penelitian pada tujuan pertama dan tujuan ke dua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Transformasi Wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon

Transformasi wilayah yang dikaji dalam penelitian ini adalah perubahan karakteristik komponen wilayah yang meliputi perubahan kepadatan penduduk, persentase lahan terbangun, persentase luas lahan sawah, serta ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan fasilitas pelayanan ekonomi yang terjadi di pinggiran Kota Yogyakarta, khususnya di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon. Aspek-aspek tersebut juga digunakan untuk menganalisis dinamika tingkat kekotaan di dua kecamatan ini. Pengkajian tingkat kekotaan pada penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai transformasi wilayah yang

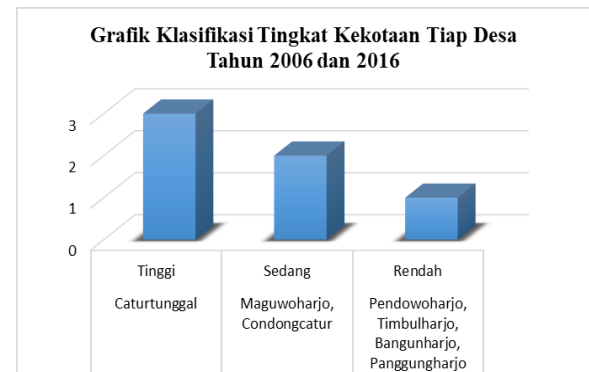
terjadi di daerah kajian. Dengan mengetahui tingkat kekotaan pada daerah kajian maka dapat diketahui kondisi wilayah saat ini, khususnya kondisi kekotaan wilayah tersebut. Dari tingkat kekotaan ini kemudian dikaji perubahan atau transformasi wilayahnya karena ada daerah dengan tingkat kekotaan tinggi namun transformasi wilayahnya rendah maupun sebaliknya yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu.

Perubahan pada masing-masing komponen transformasi wilayah dan tingkat kekotaan diamati dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu dari 2006 hingga 2016. Ada 7 desa yang menjadi wilayah kajian dalam penelitian ini, terdiri dari 3 desa di Kecamatan Depok (Desa Caturtunggal, Maguwoharjo, dan Condongcatur) dan 4 desa di Kecamatan Sewon (Desa Pendowoharjo, Timbulharjo, Bangunharjo, dan Panggungharjo). Terdapat variasi kelas untuk tingkat kekotaan di masing-masing desa, mulai dari kelas rendah, sedang, hingga kelas tinggi. Selain itu, terdapat pula variasi kelas transformasi wilayah di desa-desa pinggiran kota ini.

Berdasarkan hasil penelitan yang diperoleh, ternyata tidak ada perubahan dalam hal klasifikasi tingkat kekotaan di semua desa dalam kurun waktu 10 tahun. Baik di tahun 2006 maupun 2016, sebagian besar desa di dua kecamatan ini masuk dalam kelas rendah, terutama desa-desa yang ada di Kecamatan Sewon, sedangkan desa lainnya masuk kelas tinggi dan sedang, khususnya desa-desa yang ada di Kecamatan Depok (**Gambar 1.1**).

Terjadi perubahan pada beberapa variabel di tiap desa tahun 2016, baik itu berupa

peningkatan maupun penurunan kuantitas data. Hal tersebut menyebabkan nilai indeks komposit untuk masing-masing desa juga berubah dan mempengaruhi nilai *rescalling*. Namun demikian, perubahan pada nilai indeks komposit dan nilai *rescalling* tersebut tidak menyebabkan perubahan kelas pada masing-masing desa, sehingga dalam kurun waktu 10 tahun kelasnya sama atau tidak berubah, seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Gambar 1.1 Grafik Batang Klasifikasi Transformasi Wilayah Tiap Desa Tahun 2006 dan 2016

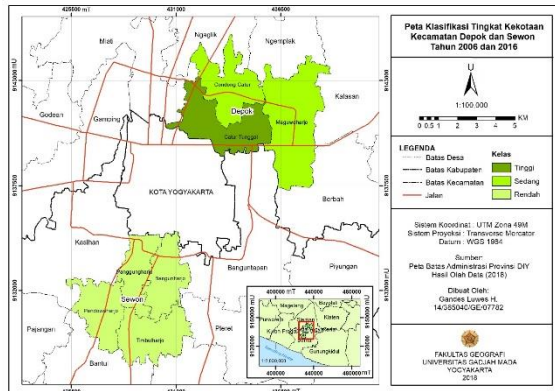
Desa Caturtunggal menempati peringkat pertama dalam hal urutan tingkat kekotaan dengan nilai *rescalling* maksimal, yakni 100 selama kurun waktu 10 tahun (Tabel 1.1). Nilai indeks kompositnya pun meningkat sebesar 148,57. Sementara itu, daerah dengan peringkat terendah berada di Desa Pendowoharjo dengan nilai *rescalling* 0. Nilai indeks komposit desa ini hingga tahun 2016 sedikit meningkat, yaitu hanya sebesar 7,91. Adapun Desa Timbulharjo mengalami pergeseran tingkat kekotaan, yang mana pada tahun 2006 menempati peringkat 6,

Tabel 1.1 Ringkasan Indeks Komposit, Nilai *Rescalling*, dan Peringkat Tingkat Kekotaan Tiap Desa (2006 dan 2016)

Desa	Indeks Komposit 2006	<i>Rescalling</i> 2006	Peringkat 2006	Indeks Komposit 2016	<i>Rescalling</i> 2016	Peringkat 2016
Caturtunggal	1468,10	100	1	1616,67	100	1
Maguwoharjo	885,53	42,59	3	987,13	45,51	3
Condongcatur	1057,94	59,58	2	1199,48	63,89	2
Pendowoharjo	453,44	0	7	461,35	0	7
Timbulharjo	526,18	7,17	6	554,02	8,02	5
Bangunharjo	701,83	24,48	5	546,81	7,40	6
Panggungharjo	733,73	27,62	4	588,09	10,97	4

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

kemudian pada tahun 2016 naik peringkat menjadi urutan 5. Ada kenaikan nilai indeks komposit di desa ini sebesar 27,84 sehingga di tahun 2016 nilai indeks kompositnya menjadi 554,02. Selain itu, Desa Bangunharjo juga mengalami pergeseran tingkat kekotaan karena mengalami penurunan peringkat, dari peringkat 5 menjadi peringkat 6 (**Gambar1.3**).



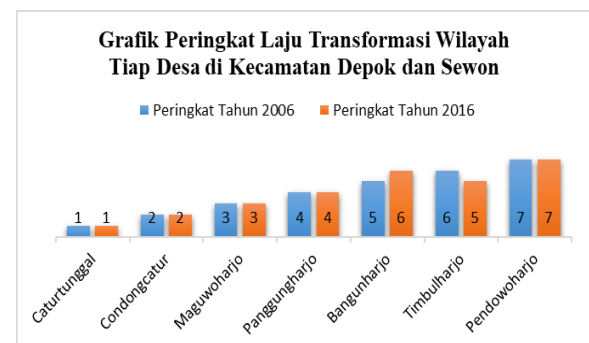
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Gambar 1.2 Peta Klasifikasi Tingkat Kekotaan di Kecamatan Depok dan Sewon Tahun 2016

Penurunan peringkat yang terjadi di Desa Bangunharjo salah satunya disebabkan oleh adanya penurunan nilai indeks komposit secara signifikan di desa ini, yakni sebesar 155,02. Oleh sebab itu, di tahun 2016 nilai indeks kompositnya hanya sebesar 546,8. Angka tersebut berada dibawah nilai indeks komposit Desa Timbulharjo. Selain Desa Bangunharjo, sebenarnya Desa Panggunharjo juga mengalami penurunan nilai indeks komposit yang cukup besar, yakni sebesar 145,64. Namun demikian, nilainya di tahun 2016 masih lebih besar daripada indeks komposit yang dimiliki oleh Desa Timbulharjo dan Desa Bangunharjo karena indeks kompositnya pada tahun 2006 relatif tinggi, sehingga penurunan nilai di desa ini tidak berpengaruh besar terhadap perubahan urutan peringkat transformasi wilayah di tahun 2016, sehingga desa ini tetap berada di peringkat 4. Sementara itu, desa-desa lainnya mengalami peningkatan nilai indeks komposit, terutama untuk desa-desa di Kecamatan Depok.

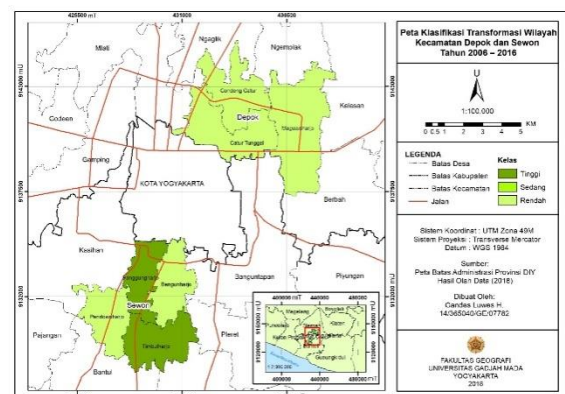
Sebaran kelas transformasi wilayah secara spasial dapat dilihat dalam **Gambar 1.4**. Jauh berbeda dengan kelas pada tingkat kekotaan sebelumnya, seluruh desa di Kecamatan Depok pada tahun 2016 memiliki kelas transformasi wilayah rendah. Lain halnya dengan desa-desa di Kecamatan Sewon, yang mana dua desa

diantaranya masuk kategori kelas rendah, sementara dua desa lainnya memiliki kelas transformasi wilayah tinggi. Rendahnya transformasi wilayah di Kecamatan Depok dapat terjadi disebabkan telah terjadi stagnasi perkembangan di daerah tersebut, mengingat desa-desa di Kecamatan ini sudah memiliki tingkat kekotaan yang tinggi. Oleh sebab itu, desa-desa di Kecamatan Sewon yang memiliki tingkat kekotaan rendah berpotensi untuk mengalami perkembangan lebih lanjut. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya transformasi wilayah yang terjadi di Desa Panggunharjo dan Desa Timbulharjo dari tahun 2006—2016.



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Gambar 1.3 Grafik Batang Peringkat Laju Transformasi Wilayah Tiap Desa Tahun 2006 dan 2017



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Gambar 1.4 Peta Klasifikasi Transformasi Wilayah Tahun 2016

b. Faktor yang menentukan Perbedaan Transformasi Wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon

Ada 5 indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor penentu perbedaan transformasi wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon, yang mana dari 5 indikator tersebut terdiri dari beberapa sub variabel sehingga total ada 20 variabel yang digunakan.

Lima indikator tersebut meliputi kepadatan penduduk, persentase luas lahan sawah, persentase lahan terbangun, jumlah fasilitas pelayanan sosial, serta jumlah fasilitas pelayanan ekonomi. Fasilitas pelayanan sosial terdiri dari fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SLB, PT), fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, RS Bersalin, apotek), dan fasilitas ibadah (masjid, gereja, pura). Adapun fasilitas pelayanan ekonomi terdiri dari beberapa prasarana, meliputi pasar umum, restoran/rumah makan, bank/KUD, dan hotel. Masing-masing variabel memiliki peranannya sendiri terhadap perkembangan suatu wilayah. Terlebih dalam kurun waktu 10 tahun terjadi perubahan data (jumlah, luas, persentase) pada sebagian besar variabel tersebut, baik itu berupa peningkatan nilai maupun penurunan data.

Uji statistik yang dilakukan menggunakan uji *Kruskal-Wallis*. Hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka ada variabel yang berbeda secara signifikan dalam mempengaruhi kelas transformasi wilayah. Sementara itu, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada variabel yang berbeda secara signifikan dalam mempengaruhi kelas transformasi wilayah. Berdasarkan hasil pengujian *Kruskal-Wallis* diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Tabel 1.2). Nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima atau dengan kata lain H_1 ditolak, yang berarti tidak ada variabel yang berbeda secara signifikan dalam mempengaruhi kelas transformasi wilayah. Artinya kondisi wilayah antara Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon sekarang ini hampir sama karena dari 7 desa yang dikaji tidak menunjukkan adanya perbedaan indikator yang mempengaruhi transformasi wilayah.

Tidak adanya faktor dominan yang mempengaruhi transformasi wilayah di dua kecamatan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan pemilihan data penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menentukan lokasi penelitian ini. Data yang diacu sudah tidak sesuai dengan kenyataan atau kondisi saat ini karena penelitian yang diacu tersebut merupakan penelitian sekian tahun yang lalu, sementara kondisi wilayah antara Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon sekarang bisa dikatakan sudah tidak jauh

berbeda. Tidak berbedanya kedua kecamatan tersebut disebabkan variabel/indikator yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada yang mempengaruhi perbedaan tingkat transformasi wilayah secara signifikan. Selain itu, bisa saja ada faktor lain di luar indikator (yang digunakan dalam penelitian ini) yang ternyata mempengaruhi perbedaan transformasi wilayah di 2 kecamatan ini.

Tabel 1.2 Faktor-faktor yang Menentukan Perbedaan Transformasi Wilayah

	Chi-Square	df	Asymp. Sig.
Kepadatan Penduduk	0,600	1	0,439
Lahan Sawah	0,000	1	1,000
Lahan Terbangun	2,400	1	0,121
TK	0,150	1	0,699
SD	0,150	1	0,699
SMP	0,600	1	0,439
SMA	3,750	1	0,053
SLB	0,000	1	1,000
PT	0,600	1	0,439
Puskesmas	0,187	1	0,666
Pustu	0,000	1	1,000
RS Bersalin	1,375	1	0,241
Apotek	1,350	1	0,245
Masjid	0,150	1	0,699
Gereja	0,611	1	0,434
Pura	2,100	1	0,147
Pasar Umum	1,375	1	0,241
Restoran/ Warung			
Makan	1,350	1	0,245
Bank/ KUD	1,350	1	0,245
Hotel	3,750	1	0,053

*) Signifikan pada taraf (α) 5 persen

Sumber: Data Sekunder diolah Tahun 2018

Namun demikian, walaupun dari hasil statistik tersebut tidak ada variabel yang berbeda secara signifikan dalam mempengaruhi kelas transformasi wilayah di Kecamatan Depok dan Sewon, tetapi ada kecenderungan hubungan antara beberapa indikator/aspek dengan tingkat transformasi wilayah yang diketahui dari hasil analisis *crosstab* atau tabel silang pada masing-masing variabel pengaruh (indikator transformasi wilayah). Aspek yang cenderung berhubungan positif dengan tingkat transformasi wilayah meliputi aspek kepadatan

penduduk, ketersediaan fasilitas pendidikan, ketersediaan fasilitas ibadah, dan ketersediaan fasilitas ekonomi. Sementara itu, aspek yang tidak berhubungan dengan tingkat transformasi wilayah yaitu luas lahan sawah, luas lahan terbangun, dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Tabel 1.3 Hubungan Kepadatan Penduduk dengan Transformasi Wilayah

Transformasi Wilayah	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Rendah	2	66,7	1	33,3	0	0	3	42,9
Sedang	1	33,3	1	33,3	0	0	2	28,6
Tinggi	0	0	1	33,3	1	100	2	28,6
Total	3	100	3	100	1	100	7	100

Sumber: Data Sekunder diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas (Tabel 1.3) dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepadatan penduduk dengan kelas transformasi wilayah. Ada 2 desa dengan peningkatan kepadatan penduduk rendah dari tahun 2006 hingga 2016 yang memiliki tingkat transformasi wilayah rendah, 1 desa dengan kepadatan penduduk sedang memiliki tingkat transformasi wilayah yang sedang juga, serta 1 desa yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi dengan tingkat transformasi wilayah yang tinggi pula. Hal ini berlaku pula untuk aspek lain yang cenderung mempengaruhi perbedaan tingkat/kelas transformasi wilayah.

c. Arahan Pengembangan Wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon

Pengambilan keputusan merupakan salah satu tahap dalam perencanaan pembangunan wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arahan atau kebijakan yang tepat dalam rangka mengembangkan suatu wilayah serta untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam pembangunan wilayah. Analisis strategi untuk menentukan arahan pengembangan wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut ini adalah strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Depok.

Strategi SO (Kekuatan-Peluang)

1. Meningkatkan peran daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan mengembangkan fasilitas pelayanan dan

sarana pasarana guna menunjang kebutuhan penduduk.

2. Bekerjasama dengan pihak investor guna optimalisasi sarana, prasarana, dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sehingga dapat terus meningkatkan kualitas SDM.

Strategi WO (Kelemahan-Peluang)

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan lebih selektif dalam memberikan izin pendirian perumahan oleh pengembang (memperketat izin), peningkatan pengawasan dari pemerintah di lapangan, pemberian sanksi bagi pelanggaran aturan.
2. Pemberian izin pembangunan harus melalui prosedur yang benar, salah satunya melalui implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan izin mendirikan bangunan. Prosedur pelayanan IMB yang panjang serta jumlah persyaratan yang banyak dapat mempersulit pengembang untuk mendirikan bangunan, sehingga alih fungsi lahan terbangun dapat ditekan.
3. Implementasi penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga dapat mengatasi hunian kumuh dan meningkatkan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi ST (Kekuatan-Ancaman)

1. Mengoptimalkan peran daerah sebagai PKN untuk meminimalisir dampak dari problematika Kota Yogyakarta yang melebar ke daerah pinggiran kota.
2. Sebagai daerah dengan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan yang memadai dan banyak dikunjungi penduduk dari luar daerah, pemerintah perlu menyusun strategi untuk mengatasi urbanisasi yang terjadi supaya tidak timbul permasalahan baru sebagai akibat dari membludaknya kepadatan penduduk.

Strategi WT (Ancaman-Kelemahan)

1. Melaksanakan kegiatan rutin monitoring dan pengawasan tata ruang. Menindak pengembang yang menyalahi aturan.
2. Konsisten dalam penerapan sanksi hukum bagi pengembang/ masyarakat yang melanggar aturan dalam pemanfaatan tata ruang.
3. Penanganan pada kawasan perumahan permukiman yang telah mengalami penurunan, melalui rehabilitasi/ perbaikan

prasarana jalan, saluran air bersih, drainase, dan sebagainya.

4. Pelaksanaan pembangunan yang selalu mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berikut ini adalah strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Sewon.

Strategi SO (Kekuatan-Peluang)

1. Memaksimalkan peran daerah sebagai kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah sekitar.
2. Pengendalian pembangunan perumahan dengan cara selektif dalam menerbitkan izin pembangunan. Mempertimbangkan regulasi serta tidak menggusur lahan pertanian yang peruntukannya bukan untuk perumahan.
3. Pengembangan perumahan untuk masyarakat umum maupun untuk MBR dengan mempertimbangkan dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) yang berbasis mitigasi bencana.

Strategi WO (Kelemahan-Peluang)

1. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penyediaan data wilayah serta memanfaatkan teknologi informasi untuk penyediaan data secara terintegrasi. Perlu adanya penyediaan database yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar dalam perencanaan wilayah serta dalam pengambilan kebijakan secara lebih tepat.
2. Implementasi Undang-Undang tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara konsisten serta pemberian sanksi bagi pelanggar kebijakan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Strategi ST (Kekuatan-Ancaman)

1. Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan, seperti kegiatan inspeksi terkait fungsi lahan serta konsisten dalam melindungi lahan pertanian abadi supaya tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang.
2. Perlu ada upaya-upaya konkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga.

3. Perlu upaya antisipasi pembangunan supaya tidak terlalu ada tekanan terhadap lingkungan. Juga diperlukan antisipasi/pencegahan dari munculnya kampung kumuh melalui penegakan aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KDB, KLB, GSB, GSJ, IMB, dsb.).

Strategi WT (Ancaman-Kelemahan)

1. Selektif dalam memberikan izin bagi para pengembang yang hendak berinvestasi guna mengantisipasi penyusutan lahan pertanian secara signifikan.
2. Implementasi program pembangunan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi *bad lock* akibat tingginya jumlah penduduk serta mengatasi permukiman kumuh.
3. Antisipasi pembangunan permukiman, pembangunan kegiatan ekonomi, serta pembangunan di sektor lainnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4. Diversifikasi pekerjaan bagi para petani guna meningkatkan pendapatan.

Kecamatan Depok sebagai salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis, dilalui oleh jalur arteri, sehingga fungsi-fungsi kota di Kecamatan Depok ikut tumbuh dan berkembang. Kecamatan ini hanya memiliki 3 desa dan merupakan jumlah paling sedikit di Kabupaten Sleman, sehingga lebih mudah dalam hal koordinasi wilayahnya. Kecamatan Depok merupakan kawasan strategis yang tumbuh dengan cepat. Oleh sebab itu, kebijakan yang perlu dikembangkan adalah pengendalian kepadatan bangunan serta sarana prasarana infrastruktur wilayah.

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Secara umum, selain yang telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan Sewon memiliki permasalahan yang sama dengan yang dialami oleh Kecamatan Depok, terutama dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Akibat terbatasnya lahan di kota menyebabkan penduduk mengakuisisi lahan-lahan pertanian di pinggiran kota sebagai lahan permukiman maupun peruntukan

lainnya. Seperti yang diutarakan oleh Ritohardoyo (2013) bahwa konsekuensi perkembangan pembangunan perumahan adalah konversi lahan pertanian ke lahan permukiman. Tingginya alih fungsi lahan pertanian (menurunnya luas lahan sawah) sebanding dengan besarnya luas lahan terbangun. Namun demikian, walaupun luas lahan di Kecamatan Sewon masih cukup besar, tetap diperlukan upaya antisipasi supaya tidak terjadi perubahan pemanfaatan lahan pada lahan pertanian abadi. Perlu ada langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya.

Selain itu, maraknya pembangunan perumahan sebagai efek dari meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di kecamatan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena terdapat pelanggaran pembangunan perumahan oleh pengembang, yaitu pelanggaran izin. Pengembang sudah melakukan pembangunan walaupun perizinan masih dalam proses. Pengembang baru melakukan izin prinsip dan masih dalam proses, sedangkan masih terdapat izin lain yang harus diajukan seperti izin lokasi dan siteplan. Perlu adanya tindakan tegas dan pemberian sanksi bagi pengembang yang melanggar aturan ini.

Ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan di Kecamatan Sewon dalam kurun waktu 2006 hingga 2016 justru mengalami penurunan, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan pendidikan karena walaupun jumlahnya menurun, terdapat kecenderungan sekolah yang mengalami kekurangan jumlah siswa di kecamatan ini. Selain itu, terdapat siswa putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, sehingga pemerintah daerah perlu memfasilitasi anak-anak tersebut guna meningkatkan angka partisipasi sekolah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

Sama halnya dengan fasilitas kesehatan, perlu adanya optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Sewon. Hal ini disebabkan hanya ada 1 rumah sakit dan 2 puskesmas di Kecamatan Sewon, sehingga pelayanannya harus terus ditingkatkan, baik dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, peningkatan fasilitas penunjang kesehatan, serta peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan menjamin

kesehatan masyarakat. Perlunya dilakukan perbaikan sistem dan menambah sarana prasarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan fasilitas pelayanan ibadah juga perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Fasilitas ekonomi di wilayah ini juga perlu ditingkatkan dalam hal kuantitas dan kualitas guna memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat jumlahnya.

KESIMPULAN

1. Transformasi wilayah yang terjadi di Kecamatan Sewon lebih tinggi daripada transformasi wilayah di Kecamatan Depok selama rentang waktu 10 tahun (2006—2016) yang ditunjukkan dengan seluruh desa di Kecamatan Depok memiliki kelas transformasi wilayah rendah, sedangkan untuk Kecamatan Sewon terdapat 2 desa (Desa Panggunharjo dan Desa Timbulharjo) yang masuk kategori kelas tinggi, dan 2 desa lainnya (Desa Bangunharjo dan Desa Pendowoharjo) masuk kelas rendah. Rendahnya transformasi wilayah di Kecamatan Depok disebabkan telah terjadi stagnasi perkembangan di daerah tersebut, mengingat daerah ini sudah memiliki tingkat kota yang tinggi. Sementara itu, desa-desa di Kecamatan Sewon yang memiliki tingkat kota rendah berpeluang untuk mengalami perkembangan lebih lanjut.
2. Tidak ada faktor dominan yang menentukan perbedaan transformasi wilayah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon. Walaupun dari hasil analisis *Kruskal-Wallis* tidak ada yang variabel berbeda secara signifikan dalam mempengaruhi transformasi wilayah, namun dari analisis *crosstab* ada beberapa aspek yang memiliki hubungan dengan tingkat transformasi wilayah di dua kecamatan ini, yaitu aspek kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, dan fasilitas ekonomi.
3. Arahan pengembangan wilayah di pinggiran Kota Yogyakarta, khususnya di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon secara umum lebih ditekankan kepada

upaya untuk menahan pertumbuhan dan kepadatan penduduk supaya tidak menimbulkan berbagai permasalahan wilayah yang baru serta upaya peningkatan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan, fasilitas ibadah, serta fasilitas pelayanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Selain itu, pengembangan wilayah juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan supaya pembangunan yang terjadi di Kecamatan Depok dan Kecamatan Sewon dapat terus berkelanjutan.

SARAN

Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu perlu adanya penambahan variabel di luar indikator (aspek penyusun transformasi wilayah) untuk dapat mengidentifikasi faktor lain yang mungkin mempengaruhi perbedaan perkembangan wilayah di dua kecamatan ini. Apabila dalam proses pengumpulan data tidak semua data dapat ditemukan atau data yang diperoleh dirasa kurang, disarankan untuk memenuhinya dengan pengambilan data primer melalui kuesioner, angket, observasi lapangan, atau pun kegiatan wawancara kepada stakeholder terkait supaya data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, serta dapat merepresentasikan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diberikan rekomendasi atau arahan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu, untuk melengkapi data juga dapat dilakukan pengumpulan data spasial. Maka dari itu, sebelum melakukan penelitian hendaknya mengecek terlebih dahulu ketersediaan data sekunder yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2015). *Teori Pertumbuhan Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BPS. (2017). *Kota Yogyakarta dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Giyarsih, Sri Rum. (2009). *Transformasi Wilayah di Koridor Yogyakarta-Surakarta*. Disertasi. Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Hariyono, Paulus. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huriati, Noni. (2008). *Perkembangan Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta Tahun 1992-2006*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- Kurniawan, A. dan Prakoso, B.S.E. (2008). *The Influence of Spatial Urbanization to Regional Condition in Periurban Areas of Yogyakarta*. Forum Geografi. Vol. 22 (1), 27-43.
- Ritohardoyo, Su. 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Yunus, Hadi Sabari. (2001). *Perubahan Pemanfaatan Lahan di Daerah Pinggiran Kota: Kasus di Pinggiran Kota Yogyakarta*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- Yunus, Hadi Sabari. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.